

PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK SEMUA DALAM PEREKONOMIAN PEDESAAN:

# **Memperluas perlindungan sosial kepada para pekerja informal**

09 Agustus 2021

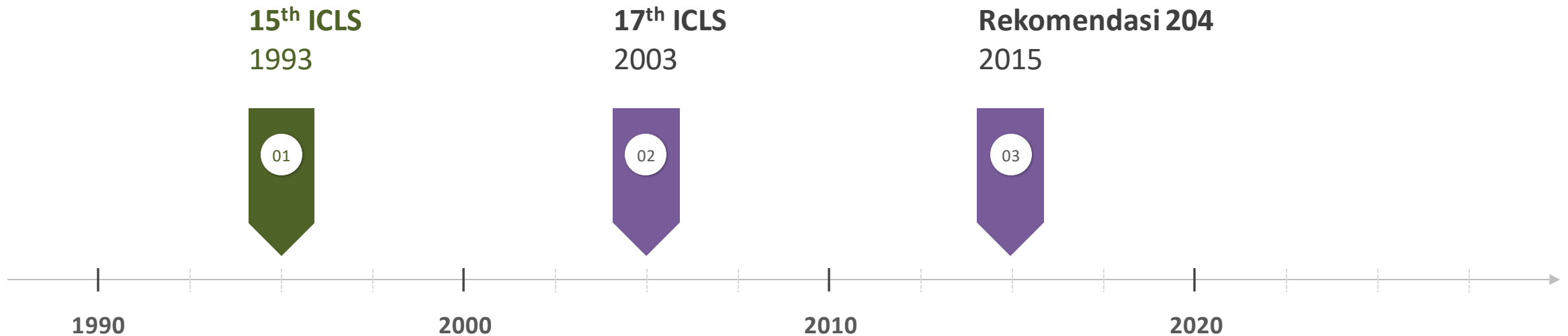
Zoom, Indonesia

**APA DEFINISI INTERNASIONAL DARI INFORMALITAS?**

## DEFINISI

# Pekerjaan dalam Sektor Informal (ICLS Ke-15, 1993)

Semua pekerjaan dalam usaha-usaha sektor informal



## DEFINISI

### *Informal employment* – pekerjaan informal (ICLS Ke-17, 2003)

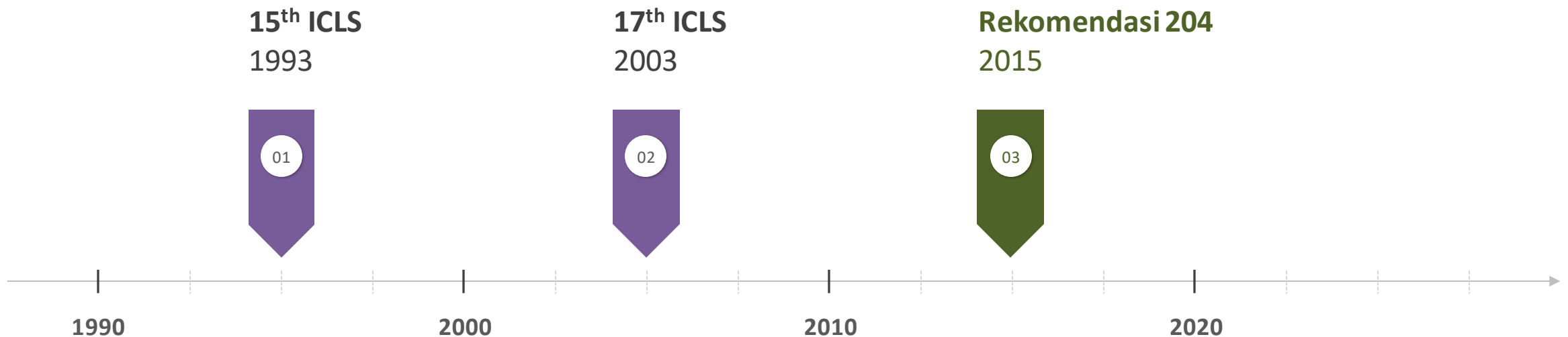
Semua pekerjaan informal, baik yang dilakukan dalam usaha sektor formal, usaha sektor informal ataupun rumah tangga



## DEFINISI

### **Ekonomi Informal** (Rekomendasi 204, 2015)

Semua kegiatan ekonomi baik oleh pekerja dan unit ekonomi yang – dalam hukum atau pada praktiknya – tidak tercakup atau kurang tercakup secara memadai dalam pengaturan formal



## DEFINISI

# Sektor Informal

Definisi berbasis **Usaha**

# Pekerjaan Informal (*Informal Employment*)

Definisi berbasis **Pekerjaan**

# APA itu **SEKTOR INFORMAL** ?

UNIT PRODUKSI
Usaha sektor formal
Usaha sektor informal
Rumah tangga

## Kriteria

- 1. Perlindungan kerja**
  - ✓ Perlindungan social
  - ✓ Jam kerja
  - ✓ Cuti dibayar
  - ✓ Uang pesangon dst.
- 2. Pendaftaran**
- 3. Kewajiban pajak**
- 4. Ukuran usaha\***

# Apa itu **PEKERJAAN** informal?

## Kriteria

### 1. **Perlindungan kerja**

- ✓ Perlindungan sosial
- ✓ Jam kerja
- ✓ Cuti dibayar
- ✓ Uang pesangon dst.

### 2. **Registrasi**

- ✓ Kontrak tertulis

### 3. **Kewajiban pajak**

## STATUS PEKERJAAN

**Pekerjaan Informal**

**Pekerjaan Formal**

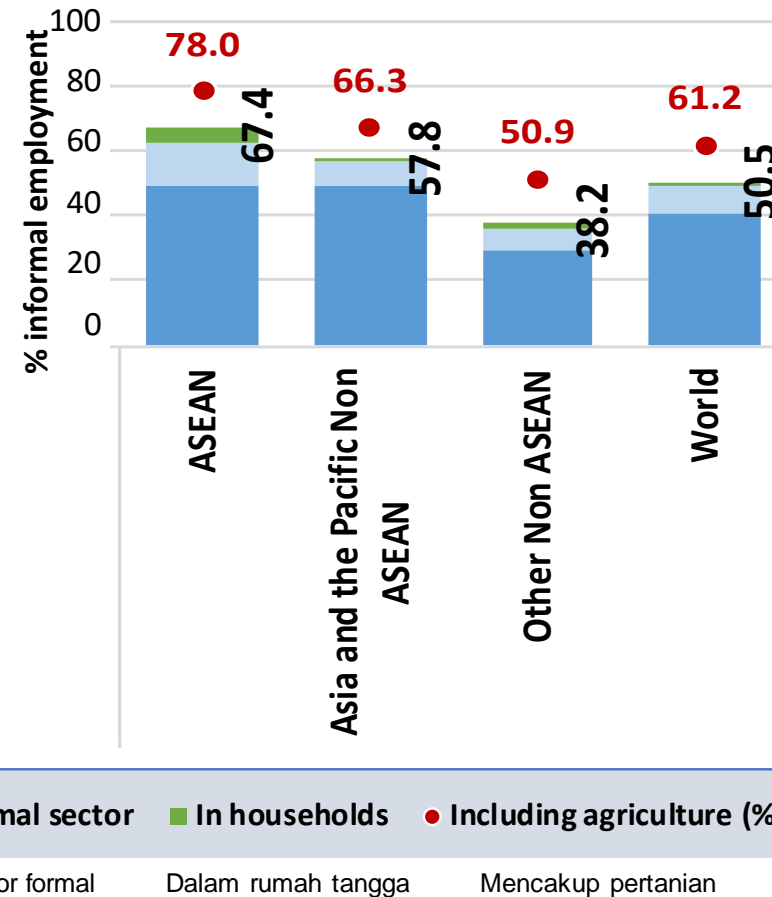


## MENGAPA PENTING MENDEFINISIKAN INFORMALITAS?

- Kategori pekerja yang berbeda memiliki tantangan yang berbeda
- Tantangan yang berbeda memerlukan solusi yang berbeda
- Mendefinisikan informalitas membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan menyesuaikan solusi

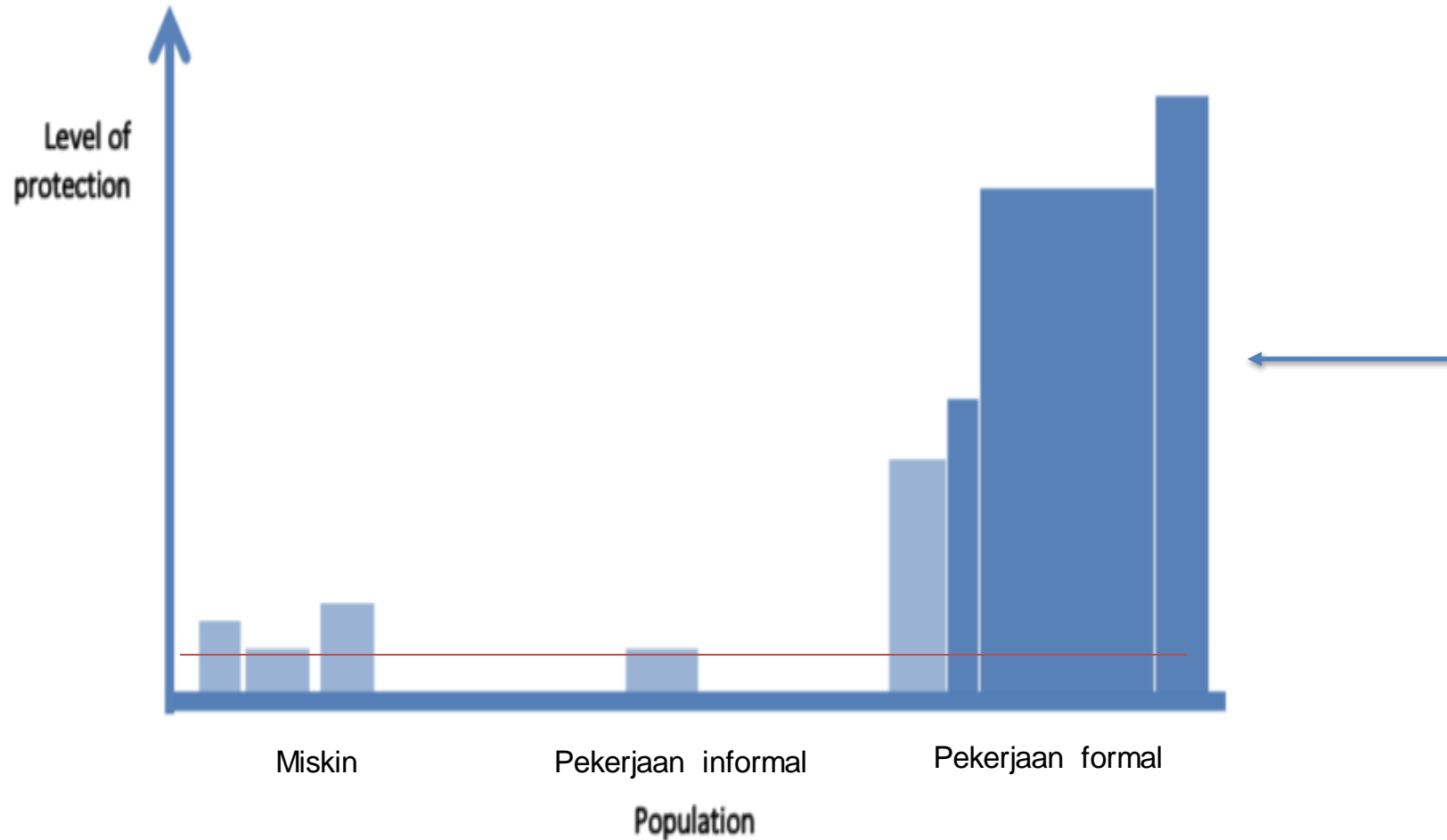
## PEKERJAAN INFORMAL DI ASEAN

- 78% dari total kesempatan kerja adalah pekerjaan informal (243 dari 312 juta pekerja)
- 67.4% ketika pertanian tidak dimasukkan



**MENGAPA PEKERJA INFORMAL SERINGKALI TIDAK  
TERCAKUP DALAM SKEMA PERLINDUNGAN SOSIAL?**

# KELOMPOK DI TENGAH SERING DIKECUALIKAN



Kurangnya keseimbangan atau koordinasi antara skema kontribusi dan non-kontribusi

# MENGHILANGKAN 4 PENGHALANG

- 1 Menghapus hambatan hukum
- 2 Mengurangi beban administratif
- 3 Mengurangi beban finansial
- 4 Meningkatkan kepatuhan

## HAMBATAN HUKUM



Kerangka hukum bisa jadi mengecualikan (tidak mencakup) beberapa kelompok pekerja tertentu

- Status kerja, jenis pekerjaan, sektor industri
- Tempat kerja
- Tipe kontrak
- Ukuran usaha
- Jumlah jam kerja
- Ambang batas penghasilan

Kerangka hukum tidak cukup spesifik untuk mencakup bentuk-bentuk pekerjaan baru

Contoh: hubungan kerja yang rancu

Contoh: berbagai pemberi kerja

Contoh: pekerja berusaha sendiri yang tersamarkan



## HAMBATAN FINANSIAL



Penghasilan yang rendah dan tidak pasti berkontribusi pada halangan finansial:

- **Kapasitas kontribusi yang terbatas**  
contoh: “tantangan kontribusi ganda” pekerja berusaha sendiri
- **Biaya umum formalisasi**  
contoh: biaya masuk atau operasional

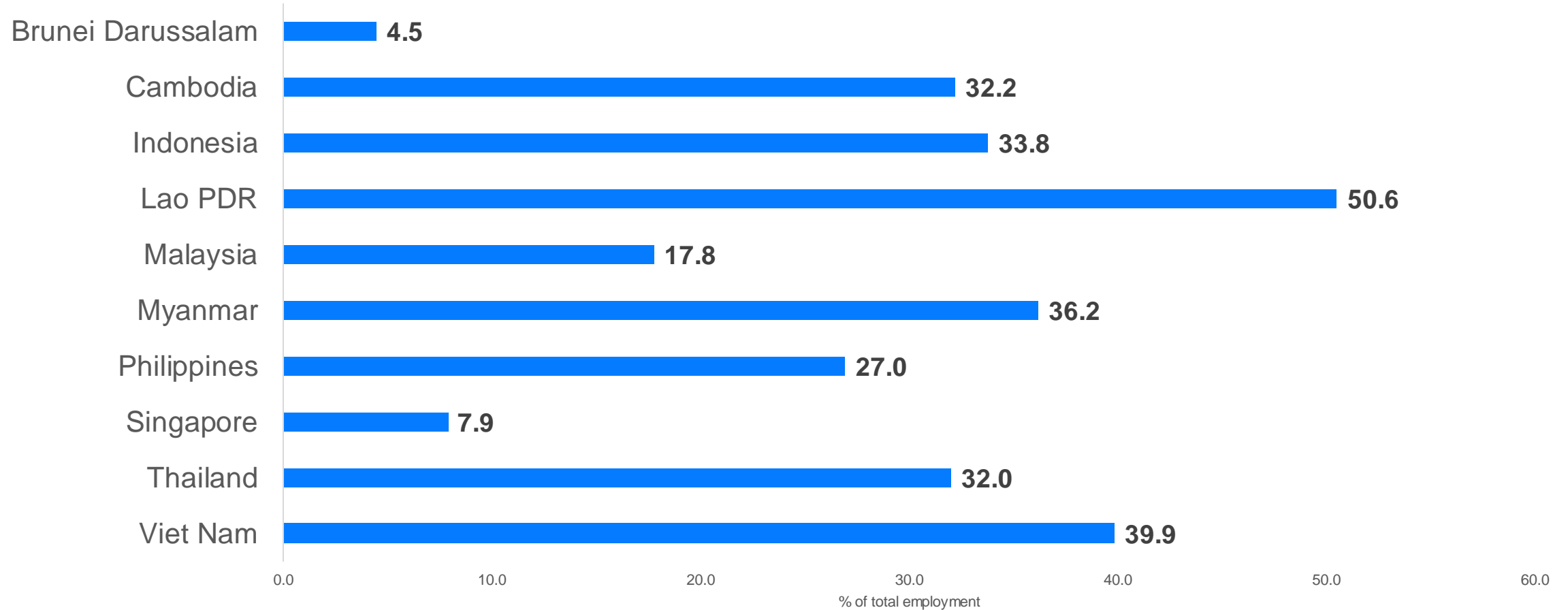
## Hambatan administratif

- Kapasitas administratif dan akuntansi yang rendah
- Akses ke layanan perlindungan sosial yang terbatas di wilayah-wilayah terpencil
- Tingkat pengetahuan dan kesadaran yang rendah mengenai topik-topik perlindungan sosial



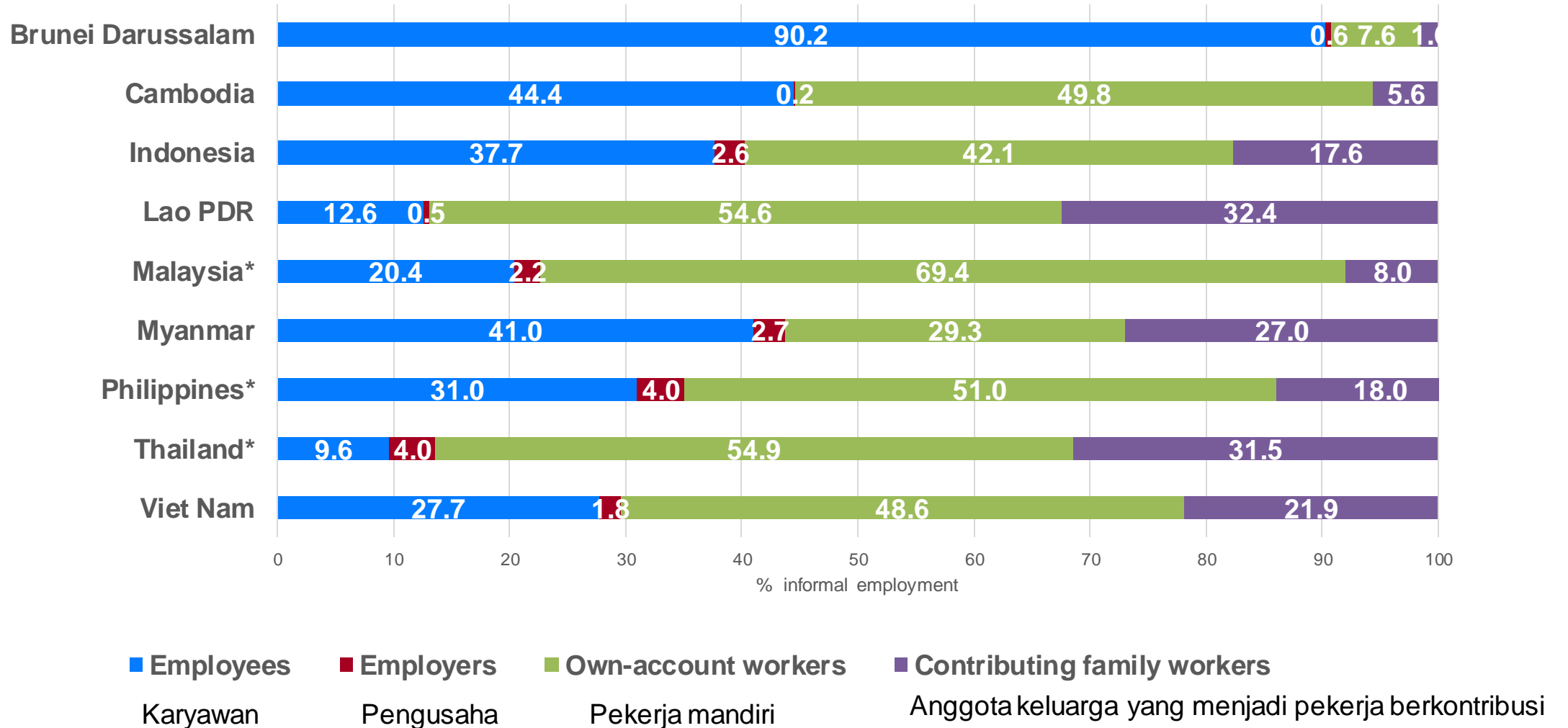
# **TANTANGAN-TANTANGAN KHUSUS**

## PROPORSI PEKERJA MANDIRI (OWN-ACCOUNT WORKERS) YANG TINGGI



**74.4%** dari pekerja mandiri adalah informal

# PEKERJA MANDIRI MERUPAKAN KELOMPOK TERBESAR DI ANTARA PEKERJA INFORMAL



# BEBERAPA FITUR PEKERJA MANDIRI DAN TANTANGAN-TANTANGANNYA

- Merupakan kelompok yang sangat beragam
- Penghasilan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi
- Pekerjaan tidak regular
- Tidak adanya pemberi kerja yang membayarkan kontribusi dan mengurus prosedur administrasi untuk sang pekerja

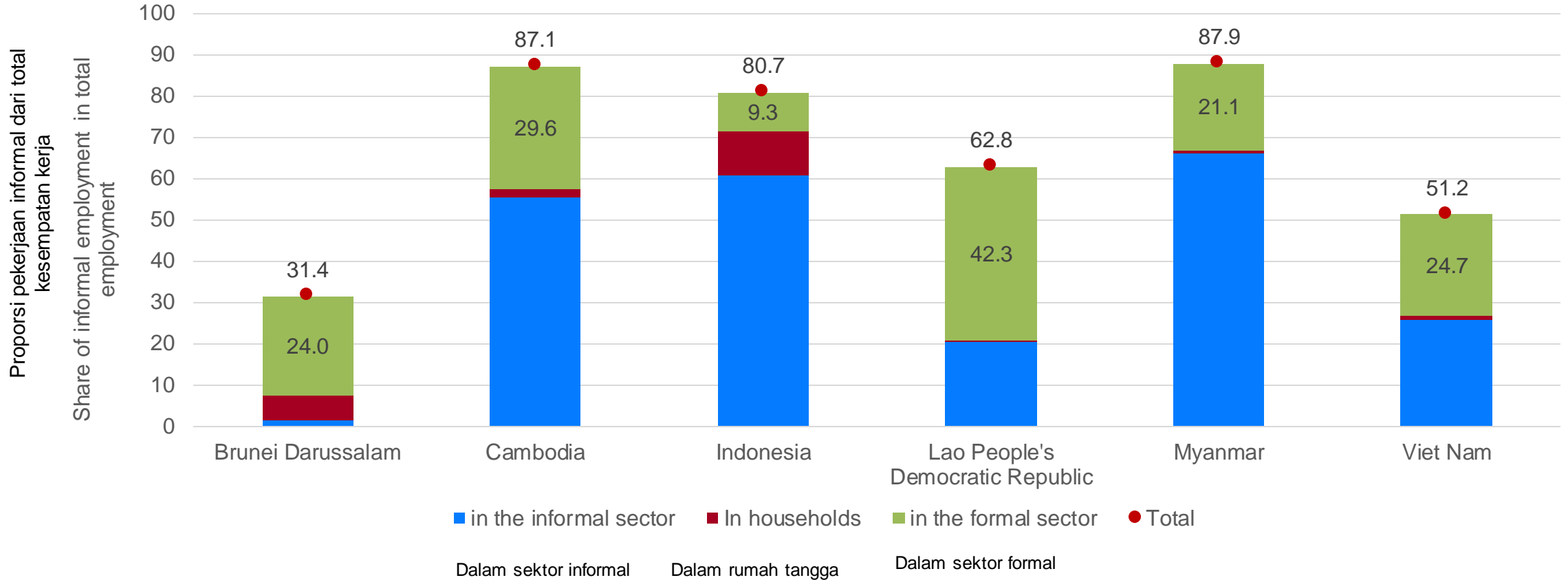
# PEKERJA MANDIRI DAN TANTANGANNYA

- Seringkali dikecualikan secara resmi dari skema-skema asuransi sosial yang wajib
- Sebagian besar hanya tercakup oleh skema sukarela
  - Persoalan seleksi yang merugikan, tingkat keluar dari skema tinggi
  - Ketidaksesuaian antara manfaat yang diterima dengan kebutuhan prioritas (seringkali kurangnya manfaat jangka pendek)
- Prosedur administrasi yang rumit dan membebani
- Kurangnya informasi dan kesadaran
- Kurangnya pengorganisasian dan representasi

## PEKERJA BERUPAH

- Pekerjaan berupah informal jumlahnya besar dan semakin bertambah
  - 57% dari semua pekerja berada dalam pekerjaan informal
  - Khususnya pekerja di UMKM, pekerja paruh waktu, buruh harian/ lepasan dan pekerja rumah tangga dibayar
  - Seringkali dalam bisnis/usaha yang tidak terdaftar atau usaha rumah tangga skala kecil

# BANYAK PEKERJA INFORMAL JUGA BERADA DALAM SEKTOR FORMAL



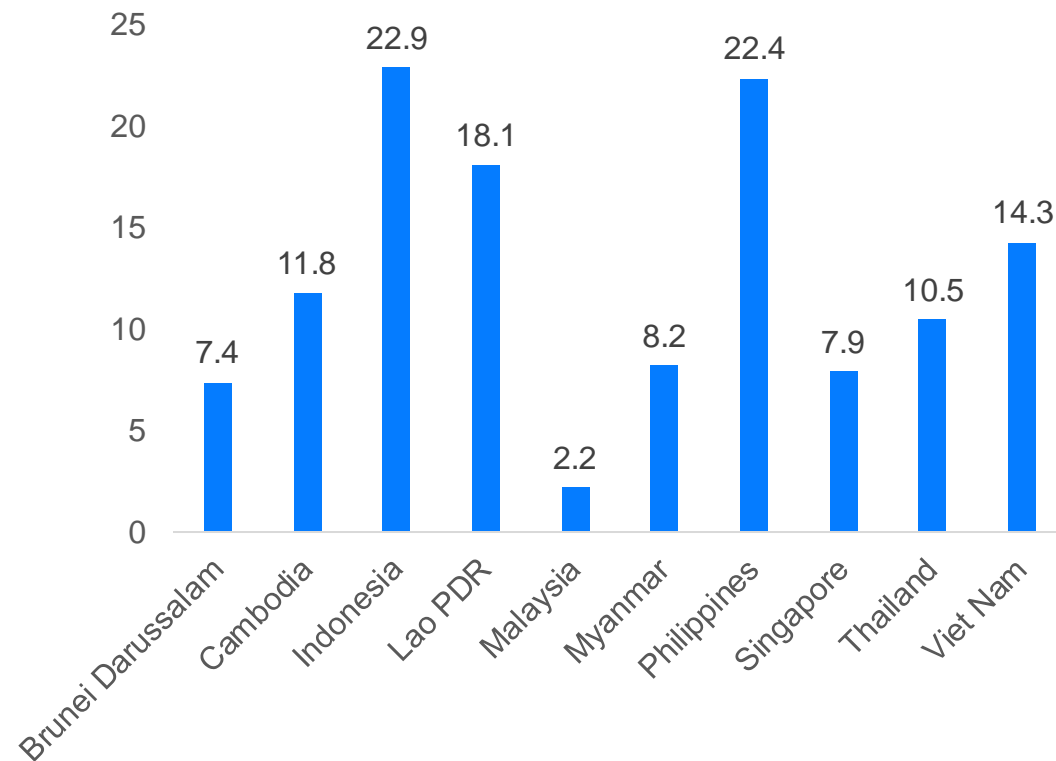
## PEKERJA UMKM

- Tidak tercakup bila ada batasan ukuran minimum usaha
- Penegakan hukum yang tidak lengkap
  - Kapasitas pengawasan untuk UMKM yang terbatas (biaya tinggi)
  - Kurangnya kepatuhan (non-registrasi, non-pembayaran kontribusi)
- Kapasitas finansial dan administrating pengusaha yang terbatas
- Pengetahuan kurang





# PEKERJA PARUH WAKTU



% total kesempatan kerja  
Sumber: perkiraan ILO, tahun terkini

- Tidak tercakup bila ambang batas jam kerja atau hari kerja minimum tidak terpenuhi.
- Tidak tercakup bila tidak diadaptasi untuk pekerja dengan pemberi kerja lebih dari satu



## PEKERJA TEMPORER DAN PEKERJA LEPASAN

- Di beberapa negara, Sebagian besar pekerja diupah memiliki kontrak sementara (PKWT):
  - Indonesia: 78.1%, Viet Nam: 68.2%, Myanmar: 50.3%
- Tidak tercakup bila ambang batas mengenai lama kerja minimum atau kelanjutan kerja minimum tidak dipenuhi
- Mereka dengan kontrak jangka pendek dan pekerja lepasan seringkali tidak tercakup dalam peraturan perlindungan sosial

# **TIPOLOGI STRATEGI-STRATEGI PERLUASAN**

## 2 STRATEGI



**Memperluas skema-skema yang ada**



**Menciptakan skema-skema baru**

**MEMPERLUAS SKEMA YANG ADA**

# CAKUPAN HUKUM

**Menurunkan ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan dari skema-skema wajib**

- Menurunkan batasan durasi kontrak (Viet Nam)
- Menurunkan batasan ukuran usaha (Viet Nam, Cambodia, Korea)

# LANGKAH-LANGKAH ADMINISTRATIF

**Menyederhanakan** registrasi, pembayaran dan pengumpulan kontribusi

- Monotax (Uruguay)
- Pendaftaran daring (Brazil)

# LANGKAH-LANGKAH ADMINISTRATIF

## Meningkatkan kepatuhan

- Memperkuat pengawasan (Peru)
- Meningkatkan kesadaran (Chile)



# SUBSIDI DALAM ASURANSI SOSIAL

## Asuransi **wajib** + subsidi

Jepang (subsidi untuk semua, pensiun)

## Asuransi **sukarela** + subsidi

Viet Nam (subsidi untuk yang rentan, asuransi kesehatan)

**MENCIPTAKAN SKEMA-SKEMA BARU**

# SKEMA UNIVERSAL

**Tidak ada persyaratan** hubungan kerja

- Pensiun universal (Timor Leste, Thailand)
- Sistem Kesehatan nasional (Malaysia)

# SKEMA SPESIFIK

## Skema **subsidi penuh**

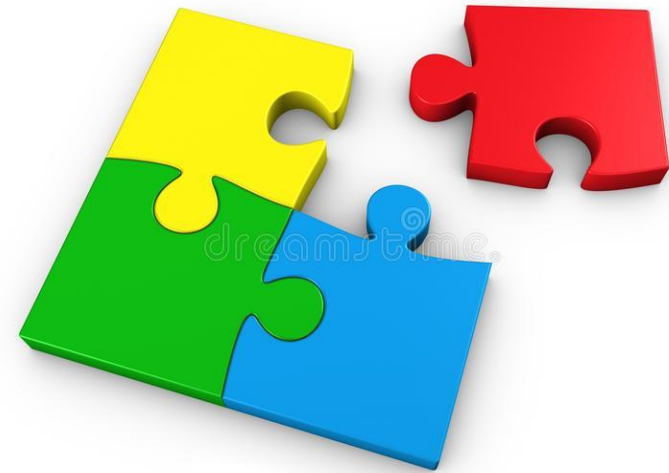
- *Means-tested pensions*: pensiun diberikan ke orang berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi keuangannya (Korea)
- *Insurance-tested health* (Thailand)

# SKEMA SPESIFIK

## Skema-skema **subsidi parsial**

- Subsidi premi (asuransi kesehatan, Cina)
- Subsidi manfaat (pensiun, Cina)

Negara-negara menghadapi  
**tantangan yang bervariasi** dan  
mengembangkan **solusi**  
**gabungan**



# **BAGAIMANA DENGAN KONTEKS INDONESIA?**

# Terima kasih

Ippei Tsuruga

Manajer Program Perlindungan Sosial

ILO Country Office for Indonesia and Timor-Leste

[tsuruga@ilo.org](mailto:tsuruga@ilo.org)